



## Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dalam Kesadaran Masyarakat Mengenai Program Keluarga Berencana di Kota Sukabumi

Ina Nuraeni<sup>1</sup>, M.Rijal Amirulloh<sup>2</sup>, Dine Meigawati<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Sukabumi  
Jl. R. Syamsudin, SH. No. 50 Kota Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

inanuraeni861@gmail.com<sup>1</sup>  
mrijal\_amirulloh@yahoo.com<sup>2</sup>  
dinemeigawati@gmail.com<sup>3</sup>

### Abstrak

Keluarga Berencana (KB) adalah proses perencanaan sebuah keluarga dengan mengatur waktu kehamilan yang sesuai dengan keinginan. Dengan dibuatnya kebijakan tentang Program Keluarga Berencana (KB) ini tentu saja dilandasi dengan kebutuhan masyarakat untuk membangun keluarga bahagia dan sejahtera. Disisi lain timbul permasalahan lain yang dimana pertumbuhan masyarakat meningkat yang berdampak pada kepadatan penduduk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dalam kesadaran masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yang menggambarkan fenomena sebenarnya dari kejadian di lapangan. Dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa strategi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dalam kesadaran masyarakat sudah berjalan dengan baik jika dilihat dari sisi rencana-rencana. Namun dari sisi sasaran-sasaran belum berjalan dengan baik. Hal tersebutlah yang menghambat keberhasilan dari strategi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dalam kesadaran masyarakat di Kota Sukabumi.

**Kata kunci** :Strategi; Pengendalian Penduduk; Keluarga Berencana.

### Abstract

The Family Planning is the process of planning a family by setting the time of pregnancy as desired. With the making of a policy on the Family Planning Program (KB) it is of course based on the community's need to build a happy and prosperous family. On the other hand, another problem arises where the growth of society increases which has an impact on population density. The purpose of this study was to determine the strategy of the Family Planning Population Control Agency in public awareness. The research method used in this study is a qualitative approach where the research conducted is descriptive which describes the actual phenomenon of events in the field. From the research, it can be concluded that the strategy of the Family Planning Population Control Agency in public awareness has been going well when viewed from the side of plans. However, in terms of targets, it has not gone well. This is what hinders the success of the Family Planning Population Control Agency strategy in public awareness in Sukabumi City.

**Keywords**: Strategy; Population Control; Family planning.



## PENDAHULUAN

Program Keluarga Berencana (KB) di Kota Sukabumi diatur dalam Peraturan Daerah No 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. "Kebijakan Keluarga Berencana (KB) dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, jarak ideal kelahiran anak dan penyuluhan kesehatan reproduksi".

Peserta KB aktif di Kota Sukabumi dapat dilihat dari data tabel dibawah yang diperoleh dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Sukabumi. Pengguna alat kontrasepsi Keluarga Berencana (KB) dibagi menjadi dua metode yaitu, Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).

**Tabel 1**

Jumlah peserta aktif penggunaan alat Kontrasepsi (KB) tahun 2015-2019

Tahun	IUD	MKJP (Jiwa)			Jumlah
		MOW	MOP	Implant	
Tahun 2015	4.201	940	130	3.324	8.595
Tahun 2016	4.873	1.101	157	3.590	9.721
Tahun 2017	5.284	1.152	155	4.080	10.671
Tahun 2018	5.678	1.240	161	4.318	11.397
Tahun 2019	5.967	1.281	158	4.446	11.852

Sumber: Disdalduk, KB, P3A, dan PM Kota Sukabumi Tahun 2019

**Tabel 2**

Jumlah peserta aktif penggunaan alat Kontrasepsi (KB) tahun 2015-2019

Tahun	Kondom	Non MKJP (Jiwa)		Jumlah
		Suntik	Pil	
Tahun 2015	1.105	19.815	10.442	31.362
Tahun 2016	1.267	18.828	10.393	30.488
Tahun 2017	1.262	19.136	10.170	30.568
Tahun 2018	1.269	19.814	9.950	31.033
Tahun 2019	1.258	20.277	9.755	31.290

Sumber: Disdalduk, KB, P3A, dan PM Kota Sukabumi Tahun 2019

### Keterangan:

- MKJP : Metode Kontrasepsi Jangka Panjang  
IUD : Intra Uterine Device  
MOW : Metode Operasi Wanita  
MOP : Metode Operasi Pria  
Non MKJP : Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

Jika dilihat dari tabel 1 dan tabel 2 diatas menunjukkan lebih banyak diminati menggunakan Non MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dibandingkan dengan menggunakan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang). Ada peningkatan minat masyarakat menggunakan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dilihat dari tabel 1 diatas dari tahun 2015 sampai 2018 terus meningkat dari tahun 2015 dengan jumlah peserta KB MKJP 8.595 peserta, dan



terus meningkat sampai ditahun 2018 dengan jumlah 11.397 peserta terus bertambah ditahun 2019 menjadi 11.852 peserta Keluarga Berencana (KB) dengan menggunakan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang). Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat yang menggunakan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) terus meningkat pertahunnya meskipun jika dibandingkan dengan Non MKJP dimana lebih banyak yang diminati masyarakat menggunakan Non MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dibandingkan dengan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).

Dengan dibuatnya kebijakan tentang Program Keluarga Berencana (KB) ini tentu saja dilandasi dengan kebutuhan masyarakat untuk membangun keluarga bahagia dan sejahtera. Disisi lain timbul permasalahan lain yang dimana pertumbuhan masyarakat meningkat yang berdampak pada kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan salah satu dari berbagai permasalahan penduduk di Indonesia. Tingginya kepadatan penduduk menyebabkan permintaan akan lahan pemukiman juga semakin tinggi dan berdampak pada perekonomian. Efek buruk yang ditimbulkan misalnya jumlah penduduk yang terlalu padat maka lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya jumlah pencari kerja.

Mengutip data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi saat ini di Kota Sukabumi mengalami peningkatan ditahun 2018 dengan jumlah penduduk 344.797 jiwa yang semula berjumlah 335.866 jiwa ditahun 2017 dan ada peningkatan 8.931 jiwa ditahun 2018. Ditambah lagi ditahun 2019 jumlah penduduk meningkat 3.334 Jiwa menjadi 348.131 Jiwa. Maka dari itu sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian serius pada masalah ini. Penyebab kepadatan penduduk salah satunya adalah faktor kelahiran merupakan faktor utama dan yang paling berpengaruh terhadap jumlah penduduk.

Faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk salah satunya faktor kelahiran, solusi untuk mengurangi kepadatan penduduk dengan program mengontrol kelahiran atau Program Keluarga Berencana (KB), tetapi sayangnya masih kurang kesadaran masyarakat terhadap Program Keluarga Berencana (KB).

Argumen ini tentunya diperkuat oleh hasil observasi awal dengan Kepala Bidang Keluarga Berencana (KB) Kota Sukabumi menyatakan bahwa meningkatnya jumlah penduduk salah satu faktornya adalah jumlah kelahiran yang dimana meningkatnya karena kurang kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Program Keluarga Berencana (KB) yang dimana Program Keluarga Berencana (KB) memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan dan ekonomi. Sebagai suatu kebutuhan, kontrasepsi terkait dengan kebutuhan fisik dan sosial. Bagi kebutuhan fisik, kontrasepsi berperan dalam setiap fase reproduksi, Yaitu untuk menunda kehamilan, menjarangkan serta mencegah kehamilan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan, peneliti menemukan fenomena masalah sebagai berikut. Jumlah penduduk Kota Sukabumi meningkat setiap tahunnya yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel 3**  
Jumlah Penduduk di Kota Sukabumi

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Selisih (Jiwa)
Tahun 2015	321.328	-
Tahun 2016	330.974	9.646
Tahun 2017	335.866	4.892
Tahun 2018	344.797	8.931
<b>Tahun 2019</b>	<b>348.131</b>	<b>3.334</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2019



Jika dilihat dari tabel 3 bahwa jumlah penduduk terus meningkat dari tahun ke tahun dapat dilihat dari tahun 2015 jumlah penduduk Kota Sukabumi berjumlah 321.328 jiwa meningkat menjadi 330.974 jiwa di tahun 2016. Dan jumlah penduduk di Kota Sukabumi terus meningkat ditahun 2019 menjadi 348.131 jiwa. Hal ini dapat dilihat adanya peningkatan jumlah penduduk yang paling mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Kota Sukabumi salah satu faktornya adalah angka kelahiran yang dimana kurangnya kesadaran warga Kota Sukabumi akan pentingnya Program Keluarga Berencana (KB).

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui jumlah pasangan usia subur (PUS) dengan jumlah peserta KB aktif yang didapat dari dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Jumlah Peserta KB Aktif di Kota Sukabumi Tahun 2019

Tahun	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Jumlah Peserta KB Aktif
2019	72.248 Jiwa	43.142 Jiwa

Sumber : Disdalduk, KB, P3A, dan PM Kota Sukabumi 2019

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dilihat jumlah peserta KB aktif yang berjumlah 43.142 jiwa yang berdasarkan dari data peserta KB aktif yang menggunakan metode alat kontrasepsi Non MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang). Dapat dilihat perbandingan dengan jumlah pasangan usia subur 72.248 jiwa dan jumlah KB aktif 43.142 jiwa. Perbandingan ini dapat dikatakan peserta KB aktif 59% dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) di Kota Sukabumi.

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi Dinas Dalduk, KB, P3A, dan PM dalam kesadaran masyarakat mengenai Program Keluarga Berencana di Kota Sukabumi.

Penelitian mengenai program Keluarga Berencana telah dilakukan oleh Denny Pratama (2018) yang berjudul "Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Menjalankan Program Kampung KB di Kabupaten Lahat". Hasil penelitian ini menunjukan sosialisai mengenai program KB belum maksimal. Jumlah KB yang belum mendekati 100% masih sedikit yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MJKP). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Farah Airin (2012) yang berjudul "Strategi Komunikasi BKKBN Provinsi Banten Dalam Proses Pembentukan Kesadaran Masyarakat Program Keluarga Berencana". Hasil penelitian menunjukan Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti Program Keluarga Berencana (KB). Yang membedakan penelitian sekarang yakni terletak pada lokus penelitian dan teori yang digunakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dari Dess dan Miller dalam Saladin (2003:2) yaitu Sasaran-sasaran, Kebijakan, Rencana-rencana.

## METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Sukabumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Indikator penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Sukabumi dalam kesadaran masyarakat mengenai Program Keluarga



Berencana. Dalam penelitian ini peneliti melihat rendahnya kesadaran masyarakat dalam Program Keluarga Berencana. Untuk mengkaji suatu strategi terkait membentuk kesadaran Program Keluarga Berencana, maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu diperlukan suatu elemen-elemen strategi, dimana banyak faktor yang saling mempengaruhi seseuai dengan faktor variabel-variabel yang dikemukakan oleh Dess dan Miller.

Subyek dari penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mengetahui dan memahami hal-hal terkait dengan fokus penelitian, sehingga mampu memberikan informasi yang diperlukan. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan non probability sampling dengan metode purposive sampling. Analisis data yang digunakan berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji validasi data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sasaran-Sasaran

Untuk mengetahui bagaimana strategi Dinas Dalduk, KB, P3A dan PM kota Sukabumi dalam kesadaran masyarakat mengenai Program Keluarga Berencana harus mempunyai sasaran yang tepat agar sebuah strategi mencapai tujuannya. Keberhasilan dari kebijakan dan upaya dalam pelaksanaan Program KB dilihat dari apa yang menjadi obyek dalam pelaksanaannya.

Pertanyaan pertama yang peneliti ajukan kepada Dinas Dalduk, KB, P3A dan PM Kota Sukabumi adalah:

“Siapa yang menjadi sasaran dari Program Keluarga Berencana di Kota Sukabumi?”

Jawaban dari informan 1,2, dan 3 yakni Program Keluarga Berencana ini adalah pasangan usia subur, PUS adalah pasangan suami istri yang sudah terikat perkawinan. Keberhasilan dari sasaran Program Keluarga Berencana ini dapat dilihat dari peningkatan akseptor KB. Selain kepada pasangan usia subur atau PUS sasarannya juga kita kepada ibu yang baru melahirkan dan kepada akseptor yang beralih cara metode kontrasepsi yang dari NON MKJP ke MKJP ataupun sebaliknya dari MKJP ke NON MKJP dengan syarat ada izin dari pasangannya tentunya dalam memilih alat kontrasepsi diwajibkan mengisi lembar persetujuan atau izin dari suami atau istri untuk menggunakan metode apa, apakah MKJP atau NON MKJP.

Dalam menggunakan alat kontrasepsi kita dapat memilih dua metode kontrasepsi yaitu NON MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), yang dimana NON MKJP terdiri dari suntik, pil dan kondom, sedangkan MKJP terdiri dari IUD(Intra Uterine Device), implant, MOW (Metode Operasi Wanita), dan MOP(metode operasi pria).

Untuk menggunakan alat kontrasepsi tentunya ada prosedur yang dimana mengisi lembar persetujuan tindakan medik (informed consent) pelayanan KB. Lembar persetujuan ini dimana kita pertama menuliskan dimana kita memilih tempat pelayanan, untuk pelayanan KB ini tentu kita dapat memilih faskes atau fasilitas kesehatan. Faskes yang disediakan seperti puskesmas, bidan dan rumah sakit. Setelah menentukan dimana tempat faskes klien menuliskan identitas nama dan memilih menggunakan alat kontrasepsi MKJP atau NON MKJP. Dan selanjutnya menuliskan identitas persetujuan dari suami/istri klien. Dan tahan terakhir tanda tangan dari dokter/bidan/ perawat yang dan tentunya dari klien.

Untuk pemasangan alat kontrasepsi tentu membutuhkan tenaga ahli seperti Dokter atau Bidan. Tentunya sebelum seseorang menggunakan atau memasang alat kontrasepsi ada pertanyaan yang diberikan yang terdapat pada formulir check list untuk provider dimana diberikan pertanyaan mengenai pengetahuan dasar mengenai metode NON MKJP maupun MKJP. Lembar check list untuk provider ini tentunya ditanyakan kepada klien dan ditandatangani oleh yang melaksanakan tindakan yaitu Dokter atau Bidan. Dalam lembar ini



diberikan 7 pertanyaan mengenai mengetahui dasar menggunakan alat kontrasepsi MKJP atau NON MKJP pada klien.

Berdasarkan pemaparan informan 1,2,3,4,5,6 dan 7 menyatakan bahwa sasaran dari Program KB yaitu pasangan usia subur atau yang sering disebut dengan PUS. PUS atau pasangan usia subur adalah pasangan suami istri dimana usia untuk PUS 15 tahun samapi 49 tahun. Sasaran dari Program KB selain kepada PUS juga kepada tokoh masyarakat, kepada tokoh agama dan juga kepada ibu yang baru saja melahirkan. Untuk pemasangan atau penggunaan alat kontrasepsi diwajibkan untuk mengisi lembar persetujuan tindakan medik untuk mendapat persetujuan klien dan tentunya persetujuan dari suami/istri klien.

Sasaran dari Program KB yaitu pasangan usia subur (PUS) yang mereka diusia 15-49 tahun tentunya yang sudah menikah. Sasaran dari Program KB ini melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama agar mendapatkan dukungan sehingga Program KB dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari Program KB. Dan diketahui jumlah peserta KB 43.142 jiwa aktif 59% dari jumlah PUS 72.248 jiwa ini menjadi permasalahan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Program KB di Kota Sukabumi.

### **Kebijakan**

Pelaksana Program KB dalam hal ini adalah instansi terkait yang diberikan wewenang dalam mengurus keluarga berencana yaitu Dinas Dalduk, KB, P3A dan PM Kota Sukabumi. Dengan melihat permasalahan kependudukan di Kota Sukabumi yang setiap tahun jumlah penduduk terus meningkat. Dengan permasalahan yang terjadi di Kota Sukabumi pemerintah mulai menggalakan program keluarga berencana di Kota Sukabumi. Hal ini dilakukan sebagai upaya menekan jumlah penduduk di Kota Sukabumi. Maka pertanyaan yang peneliti ajukan kepada Dinas Dalduk, KB, P3A dan PM kota Sukabumi adalah: "Kebijakan apa yang dibuat yang terkait dengan Program Keluarga Berencana di Kota Sukabumi?"

Dari hasil wawancara di atas dari informan 1,2,3 dan 4 kebijakan yang dibuat untuk Program KB berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Dalam pelaksanaannya tentu Dinas Dalduk, KB, P3A dan PM Kota Sukabumi untuk menjalankan Program KB berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Dari kebijakan yang sudah dibuat ini tentu ada tujuan dari program KB maka pertanyaan kedua yang peneliti ajukan kepada Dinas Dalduk, KB, P3A, dan PM Kota Sukabumi adalah: "Tujuan kebijakan Program Keluarga Berencana di Kota Sukabumi?"

Berdasarkan tanggapan di atas dari informan 1 mengenai tujuan dari kebijakan Program KB sudah diatur dalam Undang-Undang No 52 Tahun 2009 dalam pasal 21 ayat (2). Tujuan dari Program KB yang dimana tujuan itu menjadi dasar untuk Dinas Dalduk, KB, P3A, dan PM Kota Sukabumi dalam menjalankan tugasnya terkait Program KB. Kemudian bagaimana realisasi dari tujuan-tujuan Program KB apakah sudah terealisasikan dengan baik atau belum, maka pertanyaan ketiga yang peneliti ajukan kepada masyarakat adalah: "Bagaimana realisasi dari Program Keluarga Berencana di Kota Sukabumi?"

Alasan dari masyarakat mengikuti program KB karena adanya sosialisasi dari petugas tentang arti penting Program KB dalam membatasi jumlah penduduk, karena jumlah anak sudah banyak dan juga faktor umur, meningkatkan kualitas anak terutama masa pertumbuhan, untuk mengatasi masalah jumlah penduduk, untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak. Dan masih ada masyarakat yang mempercayai bahwa dengan banyak anak akan banyak rezeki dan ini masih ada masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya Program KB.

Berdasarkan pada seluruh pernyataan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa kebijakan Program KB di Kota Sukabumi diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2017 bahwa Program KB dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang Usia



ideal perkawinan, Usia ideal untuk melahirkan, Jumlah ideal anak, Jarak ideal kelahiran anak, dan Penyuluhan kesehatan reproduksi. Dan pada penerapannya masih ada masyarakat yang tidak mengikuti KB pada wawancara dengan informan 7, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Program KB. Hak tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2008) kesadaran yang rendah karena adanya beberapa keterbatasan. Misalnya: rendahnya pendidikan, rendahnya sosial-ekonomi, kurangnya sarana dan prasarana.

### **Rencana-Rencana**

Rencana-rencana merupakan urutan tindakan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan yang akan ditetapkan. Yaitu rencana mengatur segala tindakan-tindakan yang akan dilakukan sehingga strategi yang akan diterapkan dapat terlaksana dengan maksimal.

Rencana-rencana merupakan urutan tindakan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan yang akan ditetapkan. Yaitu rencana mengatur segala tindakan-tindakan yang akan dilakukan sehingga strategi yang akan diterapkan dapat terlaksana dengan maksimal, maka pertanyaan pertama yang peneliti ajukan kepada Dinas Dalduk KB, P3A dan PM Kota Sukabumi adalah: "Rencana apa saja yang telah direncanakan oleh Dinas Dalduk, KB,P3A, dan PM Kota Sukabumi untuk kesadaran masyarakat dalam Program Keluarga Berencana?"

Dari hasil wawancara, peneliti dapat diinterpretasikan bahwa rencana rencana dari Program KB dibagi menjadi tiga program sesuai dengan kasie dibidang KB yaitu, kasie pelayanan peserta keluarga berencana, kasie kesehatan reproduksi dan remaja dan kasie advokasi KIE (Komunikasi, Informasi Dan Edukasi). Dimana dari setiap kasie telah melaksanakan programnya. Dan untuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Dalduk KB, P3A, PM Kota Sukabumi dengan penyuluhan kelompok dan penyuluhan individu. Tidak hanya itu sosialisasi dilakukan dengan cara diruang terbuka seperti dibaligo, iklan di televisi dan iklan di radio. Diharapkan dengan program-program ini dapat membuat kesadaran masyarakat meningkat terhadap Program KB. Dan Program KB dapat terealisasi dengan baik agar jumlah angka kelahiran dapat dikendalikan dengan baik sehingga kepadatan penduduk tidak terus meningkat setiap tahunnya.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan data hingga pembahasan mengenai implementasi penerapan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi dari teori Van Meter Van Horn dapat diambil kesimpulan yakni : Pertama, ukuran dan tujuan dalam implementasi penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di Dinas Lingkungan Hidup diketahui dengan jelas oleh para pelaksana dan sasaran kebijakan. Kedua, sumber daya yang kurang mendukung. Dari aspek sumber daya manusia dengan jumlah kuantitas yang banyak tidak menjamin kualitas kerja yang baik hal ini disebabkan dengan santainya pada saat bekerja sehingga selalu ada alasan untuk tidak bekerja, selain itu yang menjadi penyebabnya yaitu kurang tegasnya dalam sistem rekrutmen pekerja. Ketiga, karakteristik agen pelaksana sudah berjalan baik. Pemenuhan kepentingan keselamatan dan kesehatan kerja di Dinas Lingkungan Hidup dengan adanya pembagian APD yang dapat digunakan pada saat bertugas hal ini didukung dengan sikap para pelaksana kebijakan yang dapat menyesuaikan sehingga dapat melaksanakan kebijakan yang berlaku. Keempat, sikap atau kecenderungan pelaksana dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja belum berjalan secara optimal karena masih adanya para pekerja yang kurang disiplin sehingga tidak menerapkan apa yang sudah dijadikan sebagai aturan, seperti tidak menggunakan alat pelindung diri saat bertugas hal ini dikarenakan para pekerja lapangan berpendapat bahwa dengan menggunakan alat pelindung memberikan efek ketidaknyamanan pada saat bekerja. Namun disamping itu dalam menjalankan tugasnya para pekerja sudah



diberikan pemenuhan kepentingan keselamatan dan kesehatan kerja dengan diberikannya jaminan BPJS Ketenagakerjaan, dan adanya tunjangan apabila terjadinya kecelakaan. Kelima, komunikasi yang ada sudah dapat dikatakan baik dengan adanya koordinasi pada setiap permasalahan yang ada. Keenam, dalam lingkungan ekonomi, penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja belum dikatakan baik. Upah yang diberikan hanya cukup untuk memberi makan keluarganya saja. Sedangkan untuk biaya kesehatan keluarganya khususnya dirinya pribadi belum tercukupi dari gaji pengumpul sampah. Dari lingkungan sosial, banyak masyarakat yang belum menyadari cara memilah sampah.

Adapun saran yang dapat peneliti kemukakan dari hasil penelitian yang telah dilakukan :

- 1) Adanya sistem manajemen yang jelas pada saat rekrutmen pekerja, agar dapat meningkatkan kualitas kerja sehingga dapat mencapai target kerja yang telah ditentukan.
- 2) Adanya sanksi tegas bagi para pekerja lapangan yang masih saja tidak menggunakan APD pada saat bekerja.
- 3) Meningkatkan komunikasi yang telah terjalin, sehingga melakukan koordinasi bukan hanya pada saat ada hambatan atau pelanggaran tetapi juga melakukannya secara rutin.
- 4) Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi memberikan upah yang layak bagi petugas pengumpul sampah dan dari segi sosial sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi meningkatkan antusias masyarakat dalam pelaksanaan program kebersihan dengan cara memberikan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kebersihan dan cara pemilahan sampah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afif, Faisal., Abdullah, Ismeth., 2010, Manajemen Strategik Keorganisasian publik, Bandung : Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J, 2017, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sabariah, Etika, 2016, Manajemen Strategis, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Saladin, H.Djaslim, 2004, Manajemen Strategi & Kebijakan Perusahaan, Bandung : Linda Karya.
- Sugiyono, 2017, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung : Alfabeta.
- Siagian, Prof. Dr. Sondang P, 2008, Manajemen Strategik, Jakarta : Bumi Aksara.
- Yusuf, A.Muri, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, Jakarta : Kencana.
- Airin, Farah., 2015, Strategi Komunikasi BKKBN Provinsi Banten dalam Proses Pembentukan Kesadaran Program Keluarga Berencana.
- Fitri., 2018, Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Makasar.
- Friskandhi, Dwika Ovelia., 2015, Strategi Komunikasi BKKBN Provinsi Jawa Barat dalam Mempersuasi Suami Untuk Mengikuti Program Vasektomi (Studi Kasus di Kabupaten Bekasi).
- Paradina, Nimas Novita., 2014, Strategi Komunikasi Pnyuluhan Lapangan Keluarga Berencana Dalam Partisipasi Pasangan Usia Subur Pada Program Keluarga Berencana di Kota Samarinda, Ilmu Komunikasi, 2, 258-267.
- Pratama, Denny., 2018, Strategi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan Program Kampung KB di Kabupaten Lahat.
- Susanti, Herdiana ayu., 2015, Strategi Komunikasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jurnal Komunikasi ASPIKOM, Vol 2 Nomer 4, 243- 254.
- Oktaviani, Anastasia., 2018, Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Semarang (Studi kasus dikelurahan Lamper Tengah)
- Wulandari, T. 2008. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Keluarga Berencana (Penelitian di Desa Panggunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul). *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*, 2(1).





Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga.

Departemen Kesehatan RI Tahun 1997 tentang Keluarga Berencana.

Peraturan Daerah No 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga